

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Pada era orde baru pembangunan ekonomi Indonesia menunjukkan pertumbuhan cukup tinggi. Prestasi yang dicapai Indonesia meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang diakui negara lain di dunia, bahkan Indonesia menjadi salah satu negara Asia yang mempunyai kemampuan dan pengaruh besar dalam memasuki era globalisasi.

Keberhasilan Indonesia memiliki pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi itu didasarkan pada kebijakan yang mengutamakan peningkatan produktivitas dengan menjaga kestabilan politik dan keamanan sesuai dengan yang diungkapkan Huntington (dalam Nugroho, 2000), bahwa perlunya stabilitas politik dengan cara menekan partisipasi politik. Tujuan yang ingin dicapai adalah guna memberi peluang kepada lembaga-lembaga politik untuk tumbuh dan mencapai tingkat kapabilitas politik yang sesuai dengan kebutuhan.

Untuk mengupayakan stabilitas politik dan keamanan, pemerintah orde baru sering meninggalkan unsur-unsur demokratisasi, menggunakan alat kekuasaan untuk bertindak sesuka hati dan meninggalkan Hak Azasi Manusia (HAM). Fenomena kekuasaan orde baru yang dominan dan tidak memperhatikan hak-hak rakyat diungkapkan Tim Lopera (2000), bahwa orde baru sebagai penyelenggara pemerintahan untuk membangun bangsa ternyata tidak sepenuhnya menguntungkan

masyarakat, baik pengertian secara politik maupun ekonomi. Peristiwa-peristiwa kekerasan dan pemusatan ekonomi merupakan satu fakta yang ditempuh pemerintah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Kebijakan sentralisasi ekonomi merupakan bagian lain dari program yang dijalankan pemerintah orde baru untuk memperkuat kondisi ekonomi negara. Menurut Nugroho (2000) sentralisasi adalah pemusatan pengelolaan segala kebijakan dan peraturan yang ada semuanya ditentukan oleh pemerintah pusat. Daerah sebagai pemerintahan yang ada dibawahnya melaksanakan keputusan yang dibuat pemerintah pusat. Menurut Dwipayana (dalam Tim Lapera, 2000), upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengembangkan sentralisasi selalu dibangun dengan anggapan pemerintah daerah merupakan pelaksana dari pemerintah pusat, maka pemerintah daerah dituntut untuk selaras dengan pemerintah pusat. Dalam konteks hubungan ini terjadi hubungan yang dominatif dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, dan terjadi pula pemanfaatan imbalan-imbalan ekonomi untuk membangun fondasi ekonomi daerah terhadap pusat. Hal ini menjadi penyebab ketergantungan ekonomi daerah-daerah terhadap pusat kekuasaan.

Soetrisno (1995) menambahkan dalam kaitannya dengan model pembangunan yang sentralistik, pada orde baru menggunakan pendekatan model pembangunan yang meletakkan pemerintah pusat sebagai pemrakarsa, perencana, dan pelaksana pembangunan di Indonesia. Peran pemerintah daerah hanya sebatas sebagai fasilitator dari program proyek pembangunan yang dirancang pemerintah pusat. Pendekatan pembangunan yang menggunakan sistem sentralistik dipandang dari kenyataan